

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KAJIAN PENERAPAN STANDAR KONTRAK FIDIC  
DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi diperlukan bentuk kontrak yang jelas, adil dan berimbang sehingga menjadi acuan bagi para pihak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;
- b. bahwa berdasarkan praktik terbaik pekerjaan konstruksi di dunia Internasional, standar kontrak FIDIC telah diterapkan untuk mengatur hak dan kewajiban antara para pihak;
- c. bahwa terhadap praktik terbaik internasional dalam rangka penyusunan produk hukum yang terkait dengan pengadaan yang diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga lainnya;
- d. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu melakukan kajian dan telaahan penerapan standar kontrak FIDIC dengan membentuk Tim Kajian Penerapan Standar Kontrak FIDIC dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Penerapan Standar Kontrak FIDIC dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN PENERAPAN STANDAR KONTRAK FIDIC DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Penerapan Standar Kontrak FIDIC dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan konstruksi yang diatur dalam buku Standar Kontrak FIDIC;
- b. Mengidentifikasi perbandingan Standar Dokumen dan Syarat-syarat Kontrak antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Mengidentifikasi perbandingan Hak dan Kewajiban Para Pihak antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Mengidentifikasi perbandingan Penyelesaian Pekerjaan antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Mengidentifikasi perbandingan Mekanisme Pembayaran antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Mengidentifikasi perbandingan Ruang Lingkup Perubahan Kontrak antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Mengidentifikasi perbandingan Penyelesaian Sengketa Kontrak antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Mengidentifikasi perbandingan Pengelolaan dan Dokumentasi Kontrak antara Standar Kontrak FIDIC dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Memberikan rekomendasi Standar Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Penerapan Standar Kontrak FIDIC dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KAJIAN PENERAPAN  
STANDAR KONTRAK FIDIC DALAM  
PENGADAAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI

NOMOR : 48 TAHUN 2018  
TANGGAL : 23 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM KAJIAN PENERAPAN STANDAR KONTRAK FIDIC  
DALAM PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 -
2.	Ketua	: Fadli Arif	-
3.	Anggota	: 1. R.Fendy Dharma Saputra 2. Gusti Agung Aju Diah 3. Gusmelinda Rahmi 4. Patria Susantosa 5. Zulhenny 6. Mudjisantosa 7. Hardi Afriansyah 8. Rinaldi Morintoh 9. Erlangga Aninditya 10. Ichwan Makmur Nasution 11. Ade Rizky Emirsyah 12. Adreng Kusuma Ayuningtyas 13. Imam Arumsyah 14. Ermawati Septianingtyas 15. Tri Susanto 16. Seno Haryo Wibowo 17. Fenita Enggraini 18. Eva Sinaga 19. Andi Darmawan 20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21. Kementerian PPN/Bappenas	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - - 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO